

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Baru Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan terkait dengan Kebijakan pengelolaan sampah dalam perda TTU Nomor 2 tahun 2018 tidak hanya antar pimpinan dan staf pada Dinas Lingkungan Hidup namun komunikasi juga dilakukan kepada masyarakat di Kabupaten TTU melalui program penyuluhan lingkungan yang dilakukan enam bulan sekali di beberapa kecamatan dan kelurahan, komunikasi secara langsung saat kerja bakti dan juga komunikasi melalui papan larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun yang menjadi hambatan dalam komunikasi ini yaitu kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Mereka belum membuang sampah pada tempatnya. masih banyak yang membuang sampah pada TPS liar yang membuat petugas kebersihan kesulitan dalam membersihkan dan upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih belum efektif.
2. Dinas Lingkungan hidup memiliki jumlah Sumber daya manusia sebanyak 118 orang yang terdiri dari 91 orang pegawai tidak tetap yang merupakan petugas kebersihan dan 27 pegawai tetap dan khusus pada Bidang

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun(B3) berjumlah 6 orang dan semua jabatan sudah terisi dan telah melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Para petugas kebersihan yang secara keseluruhan berjumlah 91 orang. Di Pasar Baru petugas yang turun ke lokasi itu berjumlah 11 orang yang terbagi dalam 5 petugas kebersihan dan 6 pengangkut sampah. Selain itu, fasilitas kebersihan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup mulai dari sapu, sekop, gunting bunga, alat pemotong rumput, dan lain-lain hingga tempat penampung sementara (TPS) yang tersebar di beberapa lokasi serta tempat penampung akhir yang berlokasi di kawasan hutan Desa Tublopo Kecamatan Bikomi Selatan. Fasilitas kebersihan di Pasar Baru terdapat 3 TPS di bagian depan dan 1 TPS di bagian belakang, namun hal ini dinilai masih kurang dibuktikan dengan belum terdapat mesin pendaur ulang sampah, tempat pembuangan akhir yang masih bersifat sementara dan juga kurangnya TPS di Pasar khusus di bagian belakang pasar yang mengakibatkan terciptanya TPS liar yang mengakibatkan sampah-sampah sulit untuk diangkut oleh petugas.

3. Para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dalam bentuk sikap dan respon dari petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dalam upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah baik dari Bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun(B3) serta para petugas kebersihan dan pengangkut sampah yang

turun ke lokasi masing-masing untuk membersihkan dan mengangkut sampah. Mulai dari disiplin waktu dari para petugas yang datang dan mulai bekerja hingga bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan mereka. Setiap pagi pukul 05.30 WITA petugas kebersihan sudah ke lokasi untuk mulai membersihkan dan juga pada pukul 8.00 WITA petugas pengangkut sampah juga sudah mulai mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA.

4. Struktur Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup sudah dibagi dengan baik. melalui struktur jabatan yang sudah terisi semua. selanjutnya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan juga jelas baik itu pimpinan, staf dan juga petugas kebersihan yang ada. Selain itu, seluruh staf diarahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan apabila ada hambatan atau kendala dalam bekerja, dapat didiskusikan melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin agar pelaksanaannya tidak keluar dari tupoksi yang ada.

5.2 Saran

Mengacu pada simpulan diatas peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan dalam memberikan larangan kepada masyarakat dan pedagang di Pasar Baru agar mampu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat jika masyarakat belum memiliki kesadaran dalam membuang sampah maka petugas harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarang tempat.

2. Fasilitas kebersihan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar dapat dilengkapi. Seperti jumlah TPS di Pasar Baru yang harus ditambah di bagian belakang Pasar agar tidak menciptakan TPS liar, penyediaan tempat Penampungan Akhir(TPA) yang bersifat permanen, dan mesin pendaur ulang harus diadakan agar dapat mendukung kebijakan pengelolaan sampah.
3. Komitmen/sikap dari para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dapat dipertahankan agar dapat bekerjasama dengan petugas kebersihan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah.
4. Diharapkan agar pimpinan tetap memberikan arahan kepada para staf dan petugas kebersihan sehingga bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,S.1997, *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Eko handoyo.2012.*Kebijakan Publik*.Semarang:Widya Karya.
- Indiahono,Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy,M. Irfan.1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro Sejati.2009.*Pengelolaan Sampah Terpadu*.Yogyakarta:Kanisius
- Meleong.L.J.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.Bandung
- Mulasari,S.A(2012). *Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di dusun godean kabupaten sleman yogyakarta*.jurnal kesmas volume 6. Nomor 3:204-2011
- Nugroho, Riant. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sahil, J.et.al(2016). *Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di kelurahan Dufa-Dufa kota Ternate*. Jurnal bioedukasi volume 4 nomor 2. ISSN:2301-4678/Media neliti.com
- Subarsono.2010.*Analisis Kebijakan Publik, konsep teori dan aplikasi*.Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Sugiyono.2005. *memahami penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi.2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winaryo,Budi.2012.*kebijakan publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*.Yogyakarta:CAPS

Sumber Lain-Lain :

Undang-Undang dan Peraturan

UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Peraturan Daerah Kabupaten TTU nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah

Peraturan daerah nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara

Jurnal

Baskoro A. Patria dan Badrudin Kurniawan(2021).*Implementasi kebijakan penanganan sampah di kecamatan taman Kabupaten sidoarjo*.Jurnal Ilmu Administrasi Negara.9(2).<https://ejournal.unesa.ac.id>(diakses tanggal 11 september 2021)

Mokodompis,Yulianto dan Markus Kaunang(2019).*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di kota Manado*.Jurnal Jurusan Ilmu

Pemerintahan.3(3).<https://ejournal.unstrad.ac.id>(diakses tanggal 11 september 2021)

Saepudin,Aep dan Kusendar Hadi Dede,(2021).*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*.Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.8(5), 1302-1309.<https://scholar.google.co.id>(diakses tanggal 11 september 2021).